

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	Presiden Prabowo Tetapkan DHE SDA 100% Disimpan Setahun di RI	tambang.co.id	2
2.	Detail Perubahan Pasal yang Disepakati dalam RUU Minerba	bloombergtechnoz.com	4
3.	Menkum: RUU Minerba Beri Keadilan Bagi Semua	investor.id	8
4.	Bahlil Beri Izin UKM Daerah Kelola Tambang, Syaratnya Punya Modal Rp 10 Miliar	katadata.co.id	10
5.	Aturan DHE 100% Bakal Dukung Rupiah di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump	investasi.kontan.co.id	12
6.	Antam (ANTM) Bidik Produksi 13 Juta Bijih Nikel dari Tambang SDA	market.bisnis.com	15
7.	MDKA Pacu Proyek Strategis, Perkuat Posisi di Industri Pertambangan	money.kompas.com	17
8.	Mengenaskan! Harga Batu Bara Ambruk Dekati Level Terendah 4 Tahun	cnbcindonesia.com	23

Presiden Prabowo Tetapkan DHE SDA 100% Disimpan Setahun di RI

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi menetapkan kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (17/2).

“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Prabowo.

Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.

“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” imbuh dia.

Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Dalam aturan sebelumnya, retensi atau penyimpanan DHE SDA hanya sebesar 30 persen dengan jangka waktu penyimpanan minimal tiga bulan.

Sumber: tambang.co.id

Detail Perubahan Pasal yang Disepakati dalam RUU Minerba

BADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyampaikan pasal-pasal yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi Martin Manurung menyampaikan pada 12 Februari 2025 Baleg DPR telah membentuk Panja dan melakukan pembahasan secara intensif selama empat hari.

Dalam rapat Panja tersebut telah menyepakati dan memutuskan hasil pembahasan RUU Minerba sebanyak sembilan poin antara lain:

1. Perbaiki pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.
2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan.
3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.
5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan perlindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.
6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:

-
- a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan
 - c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas
7. Pasal 169A memasukan ketentuan terkait audit lingkungan.
 8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.
 9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Adapun materi muatan perubahan RUU Minerba yang telah dibahas dan diputuskan dalam Panja yakni:

1. Memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak (koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan melalui pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi);
2. Memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baleg DPR dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba pada pembicaraan tingkat II atau Sidang Paripurna. Draf beleid ini besok, Selasa (18/2/2025) akan disahkan menjadi undang-undang baru.

“Apakah hasil pembahasan perubahan RUU perubahan keempat Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg Bob Hasan dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU Minerba, Senin (17/2/2025).

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.

Seluruh atau delapan fraksi tercatat menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Minerba atau tingkat II dalam rapat Paripurna.

Tanggapan pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan lazimnya UMKM kerap kali tidak mendapatkan ruang dalam proses tender sekalipun dibuka untuk umum.

Untuk itu, dengan adanya UU Minerba nantinya dapat prioritas dalam mengelola tambang. Bahlil menyebut Gross Domestic Product atau GDP RI sebesar 60% berasal dari UMKM. Sebanyak 130 juta lapangan pekerjaan eksisting berasal dari UMKM.

“Unit usaha kita dari kurang lebih sekitar 99,6% yang hampir kurang lebih sekitar 64 juta adalah UMKM. Tapi dalam konteks implementasi UU Minerba yang kemarin rasanya menurut saya belum mawadahi rasa keadilan itu,” tutur Bahlil.

“Sebagai Menteri yang berangkat dari UMKM dan koperasi saya setuju 100% dengan pemikiran Dewan [DPR] yang terhormat.”

Bahlil menegaskan UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, badan usaha kampus melalui BUMN dapat membantu kampus mendapatkan manfaat dari sumber daya alam.

“Inilah sebagai perwujudan daripada sila [Pancasila] kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Bahwa pemberian prioritas yang selama ini hanya diberikan kepada BUMN dengan insya Allah Undang-undang ini kalau sudah diputuskan maka ruang itu sudah bisa kita berikan kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, kampus, dan juga adalah perusahaan-perusahaan yang

meningkatkan nilai tambah lewat hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Karena kalau lama, ini repot, lama sekali.”

Berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz, DIM RUU tersebut telah diserahkan pemerintah pada Rabu (12/2/2025) kepada DPR. Pembahasan DIM dalam rapat Baleg digelar secara berurutan dan tertutup sejak Rabu (12/2/2025) hingga Senin (17/2/2025). Kemudian rapat kerap digelar malam hari secara maraton dan tertutup.

Rapat digelar secara terbuka hanya rapat pengambilan keputusan atau pleno untuk menyepakati RUU Minerba menjadi Undang-undang. (ain)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Menkum: RUU Minerba Beri Keadilan Bagi Semua

MENTERI Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba (RUU Minerba) memberikan keadilan bagi semua pihak termasuk UMKM. Pasalnya, skema pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) lebih akomodatif dan memberikan prioritas kepada UMKM dan koperasi.

Hal ini disampaikan Supratman dalam konferensi pers se usai rapat pleno DPR dan pemerintah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Adanya perubahan skema, dalam rangka untuk pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan, dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ujar Supratman dalam konferensi pers tersebut.

Menurutnya, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk, koperasi.

“Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah,” jelas Supratman.

Supratman juga mengungkapkan poin lain dari RUU Minerba, yaitu pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR.

“Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, Ormas Keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini,” tandas dia.

Supratman menegaskan kembali bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD atau perusahaan swasta.

“Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada,” tutur dia.

Hal senada disampaikan Bahlil terkait dihapusnya gagasan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan *automatically* kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain,” ujar Bahlil. Editor: Prisma Ardianto

Sumber: investor.id

Bahlil Beri Izin UKM Daerah Kelola Tambang, Syaratnya Punya Modal Rp 10 Miliar

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin pengelolaan lahan tambang akan diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah pertambangan, bukan UKM dari Jakarta.

Rencananya, UKM yang ingin mendapatkan izin harus memiliki modal Rp 10 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

"(Pelibatan) UKM ini kami akan desain untuk UKM daerah. Contoh, nikel yang ada di Maluku Utara, UKM yang dapat bukan UKM dari Jakarta, tapi UKM yang ada di Maluku Utara," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ia menyoroti bahwa selama ini, banyak izin usaha pertambangan (IUP) dikelola oleh perusahaan yang berkantor di Jakarta.

"Sekarang ini, hampir semua IUP kantornya di Jakarta. Kami ingin mengembalikan agar orang-orang daerah diberikan porsi lebih besar," kata Bahlil.

Syarat dan Mekanisme Pengelolaan

Menurut Bahlil, UKM yang ingin mengelola lahan tambang harus memiliki modal sebesar Rp10 miliar. Diharapkan, dalam 1–2 tahun ke depan, UKM tersebut dapat berkembang menjadi perusahaan besar.

"Memang itu yang UKM kehendaki, untuk kita melahirkan pengusaha-pengusaha besar dari daerah. Agar apa? Mengurangi rasio ketimpangan," katanya.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba disahkan, pemerintah akan menyusun aturan turunan yang mengatur syarat dan kriteria UKM yang berhak mendapatkan izin tambang.

"Ada spesifikasinya (UKM bisa mengelola tambang). Kalau nggak bisa, ya, perusahaan-perusahaan besar dulu yang mengelola. Kan ada batas-batas modalnya di undang-undang," ujar Bahlil.

Pengesahan RUU Minerba

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Minerba untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (18/2). RUU ini mengatur beberapa poin utama, antara lain:

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

1. Keterlibatan koperasi, UKM, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
2. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penguatan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan, khususnya bagi BUMN yang mengemban usaha terkait hajat hidup orang banyak.

Selain itu, DPR juga mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi untuk mendukung perekonomian nasional, pemerataan dan keadilan, hingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia. Reporter: Antara

Sumber: katadata.co.id

Aturan DHE 100% Bakal Dukung Rupiah di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

MATA uang Rupiah dalam jangka pendek masih akan dibayangi ketidakpastian seputar kebijakan Trump. Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memperkuat fundamental rupiah.

Analisis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai, rupiah masih dipenuhi ketidakpastian oleh faktor eksternal terutama kebijakan Presiden AS, Donald Trump. Bukan hanya soal tarif, isu mengenai perang Ukraina, Timur Tengah hingga ambisi Trump menguasai Greenland telah menimbulkan gejolak di pasar.

“Prospek Rupiah dan mata uang lainnya akan ditentukan bagaimana arah kebijakan Trump dan seberapa agresif untuk mencapai hal yang diinginkannya,” kata Lukman kepada Kontan.co.id, Senin (17/2).

Seperti diketahui, Trump berencana akan segera menerapkan tarif yang tertunda pada Meksiko dan Kanada pada 4 Maret 2025. Tak hanya itu, Trump masih membuka peluang untuk penerapan tarif impor bagi negara-negara yang dianggap merugikan AS.

Presiden AS terpilih ini juga memiliki niatan untuk menguasai Greenland, Terusan Panama hingga Kanada. Ambisi Trump untuk menguasai wilayah tersebut yakni bertujuan memperkuat keamanan nasional.

Sementara itu, Lukman memandang bahwa data ekonomi domestik juga belum bagus seperti data neraca perdagangan yang dirilis hari ini, Senin (17/2). Meski kembali surplus US\$ 3,45 miliar di bulan Januari 2025, namun impor terpantau jauh lebih kecil dari harapan. Begitu juga dengan ekspor yang lebih rendah dari harapan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pada Januari 2025 mencapai US\$ 21,45 miliar, turun 8,56% dibandingkan posisi Desember 2024. Sedangkan impor turun lebih dalam mencapai 15,8% menjadi US\$ 18 miliar.

Menurut Lukman, rupiah mungkin bisa lebih kuat jika aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mulai berlaku pada 1 Maret 2025 mendatang. Aturan DHE ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka diperpanjang menjadi satu tahun pada gilirannya dapat mendorong cadangan Devisa (DHE) dan berefek positif untuk nilai tukar.

Di samping itu, perlu intervensi dari Bank Indonesia (BI) untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga yang ditingkatkan. Namun, mengerek suku bunga tidak ideal dilakukan saat kondisi ekonomi tengah lesu.

Lukman berujar, BI mungkin akan terus mendorong penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menarik arus masuk (inflow) ke pasar modal tanah air. Hanya saja, efektif atau tidaknya instrumen ini diserap sangat tergantung minat investor asing.

“Walau cenderung tertekan, BI akan terus intervensi. Dan dengan cadangan devisa yang didukung oleh PP DHE, maka rupiah diperkirakan masih akan di bawah Rp 17.000 per dolar AS,” jelasnya.

Di lain sisi, Lukman berharap dolar AS melemah seiring adanya potensi damai antara Ukraina dan Rusia, serta kebijakan Trump yang lebih halus yang dapat menciptakan sentimen risk-on di pasar.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, sentimen risk-on tengah meningkat di kawasan Asia saat ini dipicu data penjualan ritel AS yang berkontraksi. Alhasil, rupiah terpantau menguat 0,14% secara harian ke level Rp 16.228 per dolar AS di Senin (17/2).

Departemen Perdagangan AS melalui Biro Sensus melaporkan pada Jumat (14/2) bahwa penjualan ritel turun 0,9% bulan lalu, setelah mengalami revisi kenaikan sebesar 0,7% pada Desember. Angka tersebut jauh lebih buruk dari konsensus yang memperkirakan penurunan 0,1%.

“Kontraksi data penjualan ritel meningkatkan peluang pemotongan suku bunga yang lebih agresif, sehingga menurunkan permintaan Dolar AS secara global,” ungkap Josua kepada Kontan.co.id, Senin (17/2). Selain itu, Josua mencermati bahwa apresiasi rupiah berkat pengumuman dari penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor. Aturan DHE akan mewajibkan eksportir menahan devisa hasil ekspornya 100% di Indonesia.

Kabar terbaru menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025, soal kebijakan DHE tersebut, Senin (17/2). Prabowo berharap aturan DHE memperkuat Cadangan Devisa Indonesia.

Dalam aturan baru ini, penempatan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri akan diperpanjang dari minimal 3 bulan menjadi 1 tahun. Kemudian persentase retensi bagi eksportir menyimpan DHE SDA akan dinaikkan dari paling sedikit 30% menjadi 100%.

“Aturan DHE ini diharapkan akan mendorong peningkatan cadangan devisa Indonesia, yang pada gilirannya mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah,” tutur Josua.

Josua memproyeksi, pergerakan rupiah selanjutnya akan datar (sideways) sejalan dengan investor menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (19/2). Di hari Selasa (18/2), rupiah kemungkinan akan diperdagangkan di rentang Rp 16.175 - Rp 16.275 per dolar AS.

Sumber: investasi.kontan.co.id

Antam (ANTM) Bidik Produksi 13 Juta Bijih Nikel dari Tambang SDA

PT ANEKA Tambang Tbk. (ANTM) menargetkan kapasitas produksi dari blok tambang PT Sumberdaya Arindo (SDA) mencapai sekitar 13 juta wet metric ton (wmt) bijih nikel pada 2027 atau 2 tahun mendatang. Saat itu, blok tambang SDA bakal berproduksi dalam skala penuh.

Kendati demikian, manajemen ANTM membeberkan kapasitas produksi dari blok tambang SDA saat ini berada di kisaran 3 juta wmt saprolit.

ANTM telah mendapat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk kegiatan penambangan di blok SDA tersebut selama periode 2024 sampai dengan 2026. Persetujuan dari otoritas minerba turun pada 22 Oktober 2024.

“Produksi yang akan kita hasilkan nanti adalah 3 juta wmt dalam bentuk saprolit, sampai ke 13 juta wmt nanti rencana produksinya [saprolit dan limonit],” kata Direktur Utama ANTM Nico Kanter saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Seperti diketahui, blok tambang SDA itu merupakan kerja sama ANTM dengan HongKong CBL Limited, entitas bisnis CATL, dalam peta jalan hilirisasi bijih nikel menjadi baterai listrik.

Dalam usaha patungan di sisi hulu tambang itu, ANTM memegang 51% saham dan HongKong CBL Limited mengamankan kepemilikan 49% saham pada PT SDA.

Adapun, proyek itu memiliki nilai investasi sekitar US\$74 juta. Saat ini, ANTM tengah mengurus izin AMDAL untuk dapat mengerjakan penambangan dari blok tersebut.

“Kita juga mengurus AMDAL SDA yang sampai saat ini masih berlangsung mudah-mudahan bisa terbit di kuartal I/2025, kemudian kita juga mengurus FEED untuk pengembangan tambang,” kata Nico.

Seperti diberitakan sebelumnya, ANTM mencatat penurunan produksi bijih nikel dan feronikel sepanjang 2024 yang berimbas terhadap volume penjualan.

Manajemen Antam menerangkan koreksi produksi tiga komoditas utama perseroan disebabkan karena keterlambatan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan ketidakpastian makroekonomi global.

“Tantangan perizinan dihadapi sejak awal 2024 telah ANTM kelola dengan baik sehingga berhasil mengoptimalkan kinerja produksi dan penjualan komoditas nikel,” tulis manajemen ANTM lewat keterangan resmi dikutip, Senin (3/2/2025).

Sepanjang 2024, ANTM mencatat produksi bijih nikel sebanyak 9.935.403 wet metric ton (wmt), lebih rendah 26,1% dibandingkan dengan produksi pada 2023 yang mencapai 13.445.579 wmt.

Sementara itu, produksi feronikel sepanjang 2024 mencapai 20.103 ton nikel dalam feronikel (TNi), relatif susut 6,38% dari pencatatan tahun sebelumnya di angka 21.473 TNi.

Pada periode yang sama, volume penjualan bijih nikel Antam tercatat sebanyak 8.354.231 wmt. Jumlah itu turun 26,88% year-on-year (YoY) dari realisasi penjualan bijih nikel pada 2023 sebanyak 11,71 juta wmt.

Adapun, penjualan feronikel ANTM turun 3,4% YoY dari 20.138 TNi pada 2023 menjadi 19.452 TNi pada 2024.

“Antam berhasil memperluas jaringan pemasaran produk feronikel dengan tujuan utama ekspor yang tidak hanya berorientasi ke China, tetapi juga ke India dan Korea Selatan,” papar Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie dalam laporan dikutip Senin (3/2/2025). Editor : Rio Sandy Pradana

Sumber: market.bisnis.com

MDKA Pacu Proyek Strategis, Perkuat Posisi di Industri Pertambangan

PT MERDEKA Copper Gold Tbk (IDX: MDKA) terus mempercepat pengembangan proyek-proyek strategisnya guna memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama di industri pertambangan Indonesia.

Sejumlah proyek tambang, seperti emas, tembaga, hingga nikel, diharapkan mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan ke depan.

Salah satu proyek unggulan yang tengah digarap adalah Pani Gold Project (PGP) atau Emas Pani, yang diproyeksikan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia.

Hingga kuartal IV-2024, progres konstruksi proyek tersebut telah mencapai 33 persen. Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini akan mulai beroperasi pada akhir 2025 dengan produksi emas perdana diperkirakan pada awal 2026.

Selain itu, proyek Tembaga Tujuh Bukit terus menunjukkan perkembangan positif. Berbagai aktivitas eksplorasi dan pengeboran sumber daya di permukaan terus dilakukan guna memastikan kelayakan tambang terbuka yang potensial.

Studi prakelayakan terbaru akan dirilis pada kuartal II-2025, dengan estimasi cadangan bijih yang lebih besar dan target laju produksi tambang bawah tanah menggunakan metode sublevel caving (SLC) sebesar 6 juta ton per tahun (6Mtpa).

Di sektor hilirisasi, MDKA juga mempercepat kegiatan commissioning di Pabrik Acid, Iron, Metal (AIM).

Pabrik pirit kini telah beroperasi penuh, sementara pabrik asam mencatat produksi tertinggi sejak beroperasi pada April 2024, dengan output mencapai 164.985 ton asam dan 225.036 ton uap pada kuartal terakhir.

Pabrik logam klorida yang telah selesai dibangun saat ini tengah menjalani tahap commissioning, sedangkan pabrik katoda tembaga berada di fase akhir konstruksi dan telah memulai commissioning parsial.

Pada Desember 2024, PT ESG New Energy Material (PT ESG) berhasil memproduksi batch pertama Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), menandai pencapaian penting dalam strategi hilirisasi MDKA di sektor material baterai.

Presiden Direktur (Presdir) MDKA Albert Saputro mengatakan bahwa operasional emas, tembaga, dan nikel MDKA berjalan sesuai target produksi, dengan pendapatan unaudited mencapai 575,8 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada kuartal terakhir dan 2,2 miliar dollar AS sepanjang 2024.

Capaian tersebut, kata dia, mencerminkan pertumbuhan tahunan atau year-on-year (YoY) masing-masing sebesar 7 persen dan 31 persen.

“Kami terus mengembangkan proyek-proyek berskala global, termasuk proyek Emas Pani, serta proyek Tembaga Tujuh Bukit yang merupakan salah satu deposit tembaga belum tergarap terbesar di dunia,” ujar Albert dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

“Di MBMA, commissioning dua fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) akan semakin memperkuat posisi kami sebagai pemimpin dalam rantai pasok baterai dan kendaraan listrik,” sambungnya.

Keberlanjutan dan ESG

Dalam aspek keberlanjutan, MDKA mempertahankan peringkat A dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), menjadikannya satu-satunya perusahaan tambang Indonesia yang meraih peringkat ini dalam kategori Diversified Metals and Mining.

MDKA juga menerima berbagai penghargaan, termasuk Silver Rank dalam Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2024 dan peringkat A+ dalam Studi Laporan Keberlanjutan Perusahaan Terbuka di Indonesia 2023.

Selain itu, MDKA memperoleh peringkat Sapphire dalam Sustainable Business Integrity Index 2024 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) dan Tempo Data Science.

Albert optimistis bahwa investasi strategis yang dilakukan perusahaan akan berdampak signifikan terhadap kinerja ke depan, terutama dengan dimulainya operasi di dua fasilitas HPAL MBMA dan commissioning Proyek Emas Pani pada akhir 2025.

“Aset kelas dunia dan komitmen kami terhadap keberlanjutan serta prinsip ESG semakin memperkokoh posisi Grup Merdeka sebagai perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia,” tuturnya.

Kinerja operasional tetap solid

MDKA mencatat kinerja operasional yang solid pada kuartal yang berakhir 31 Desember 2024, dengan pertumbuhan produksi yang tinggi, efisiensi biaya, dan kemajuan strategis.

Tambang Emas Tujuh Bukit memproduksi 35.824 ounce (oz) emas dengan total biaya tunai 975 dollar AS per oz, biaya berkelanjutan menyeluruh (AISC) 1.260 dollar AS per oz, dan harga jual rata-rata (ASP) 2.672 dollar AS per oz.

Selama periode tersebut, 29.056 ounce emas telah terjual, menghasilkan pendapatan unaudited sebesar 83,4 juta dollar AS, termasuk 6 juta dollar AS dari penjualan perak.

Sementara itu, Tambang Tembaga-Pirit Wetar memproduksi 3.419 ton tembaga dengan total biaya tunai 1,63 dollar AS per pound, AISC 2,83 dollar AS per pound, dan ASP 4,18 dollar AS per pound.

Sebanyak 3.101 ton tembaga telah terjual dengan pendapatan unaudited sebesar 28,6 juta dollar AS.

Produksi emas pada fiscal year (FY) 2024 atau tahun fiskal 2024 mencapai 115.867 ounce, sesuai panduan, dengan total biaya tunai 1.017 dollar AS per oz, AISC 1.337 dollar AS per oz, dan ASP 2.371 dollar AS per oz.

Produksi tembaga mencapai 13.902 ton, berada dalam kisaran panduan 13.500 hingga 14.000 ton.

Tambang Tembaga-Pirit Wetar melampaui target biaya tunai dan AISC dengan biaya tunai 2,63 dollar AS per pound dan AISC 3,58 dollar AS per pound.

MDKA menetapkan target produksi 100.000 hingga 110.000 ounce emas dan 11.000 hingga 13.000 ton tembaga untuk tahun fiskal 2025.

Kinerja kuat MBMA

Adapun anak usaha MDKA, MBMA mencatat kinerja operasional solid pada kuartal yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini didukung oleh pertumbuhan produksi nikel yang signifikan serta pencapaian produksi perdana MHP.

Tambang Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) mencatat produksi bijih tertinggi dalam satu kuartal dengan 3,0 juta wet metric ton (wmt) saprolit dan 3,4 juta wmt limonit, meningkat masing-masing 108 persen dan 110 persen secara tahunan.

Sebanyak 2,01 juta wmt bijih saprolit dikirim ke smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) MBMA, sementara 4,1 juta wmt bijih limonit dijual ke PT Huayue Nickel Cobalt (HNC), menghasilkan pendapatan unaudited sebesar 73,2 juta dollar AS dengan harga jual rata-rata 17,9 dollar AS per wmt.

Pada tahun fiskal 2024, Tambang SCM berhasil meningkatkan produksi bijih lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan produksi saprolit mencapai 4,9 juta wmt dan limonit mencapai 10,1 juta wmt.

Sejalan dengan peningkatan tersebut, biaya tunai atau cash cost untuk saprolit turun dari 28,4 dollar AS per wmt pada kuartal I-2024 menjadi 21,6 dollar AS per wmt pada kuartal IV-2024. Sementara, cash cost limonit turun dari 11,5 dollar AS per wmt menjadi 9,0 dollar AS per wmt.

Selama kuartal IV-2024, fasilitas pemurnian MBMA memproduksi total 30.716 ton nikel, terdiri atas 18.823 ton nickel pig iron (NPI) dan 11.893 ton high-grade nickel matte (HGNM).

Produksi tersebut menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar 223,8 juta dollar AS dan 158,8 juta dollar AS, dengan ASP sebesar 11.887 dollar AS per ton untuk NPI dan 13.229 dollar AS per ton untuk HGNM.

Pada tahun fiskal 2024, MBMA mencatat produksi 82.161 ton nikel dalam NPI dengan cash cost 10.307 dollar AS per ton, sesuai dengan rentang panduan 2024. Ini mencerminkan peningkatan volume 26 persen YoY serta penurunan biaya sebesar 15 persen YoY.

Produksi HGNM mencapai 50.315 ton dengan cash cost 13.547 dollar AS per ton atau meningkat 66 persen YoY dengan penurunan biaya sebesar 8 persen YoY.

Strategi dan target MBMA pada 2025

Pada 2025, MBMA menargetkan pengiriman 6,0 hingga 7,0 juta wmt bijih saprolit dan 12,5 hingga 15,0 juta wmt bijih limonit.

Biaya tunai diproyeksikan tetap di bawah 23 dollar AS per wmt untuk saprolit dan 11 dollar AS per wmt untuk limonit, dengan ekspektasi penurunan biaya lebih lanjut.

Produksi NPI diperkirakan mencapai 80.000 hingga 87.000 ton, dengan cash cost di bawah 11.000 dollar AS per ton dan AISC di bawah 11.200 per ton.

Sementara itu, produksi HGNM ditargetkan berkisar antara 50.000 hingga 55.000 ton dengan cash cost dan AISC di bawah 13.500 dollar AS per ton.

Produksi MHP diproyeksikan mencapai 25.000 hingga 30.000 ton, dengan cash cost rata-rata di bawah 9.000 dollar AS per ton setelah kredit kobalt, begitu operasi HPAL mencapai kapasitas optimal.

Presiden Direktur MBMA Teddy Oetomo mengatakan bahwa kinerja operasional MBMA yang kuat pada 2024 mencerminkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi.

“Pada 2025, kami berada dalam posisi pertumbuhan yang kuat berkat peningkatan produksi bijih nikel, peningkatan kapasitas pemurnian nikel, serta beroperasinya fasilitas HPAL. Langkah ini semakin memperkuat posisi kami dalam rantai nilai baterai dan kendaraan listrik,” jelasnya.

Teddy menambahkan, MBMA tetap berkomitmen pada keberlanjutan, praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta optimalisasi biaya seiring dengan ekspansi operasi perusahaan.

“Investasi kami dalam HPAL dan Pabrik AIM akan menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan serta mendukung transisi energi global,” ucapnya.

Dengan strategi yang solid dan pencapaian yang kuat, lanjut Teddy, MBMA berada dalam posisi yang baik untuk terus meningkatkan perannya sebagai pemain utama dalam industri bahan baterai global.

MBMA, sebut dia, akan terus berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan profitabilitas yang berkelanjutan.

Sumber: money.kompas.com

Mengenaskan! Harga Batu Bara Ambruk Dekati Level Terendah 4 Tahun

HARGA batu bara terpantau kembali terpukul dan mendekati level terendah dalam empat tahun terakhir. Melemahnya harga dipicu peningkatan produksi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Peningkatan produksi dikhawatirkan membuat kelebihan pasokan sehingga harga tertekan.

Dilansir dari *Refinitiv*, harga batu bara pada 17 Februari 2025 tercatat sebesar US\$104,6/ton atau turun 0,48% dibandingkan penutupan perdagangan 14 Februari 2025 yang sebesar US\$105,1/ton.

Posisi harga batu bara kali ini merupakan yang terendah dalam hampir empat tahun terakhir atau 20 Mei 2021. China mengumumkan bahwa produksinya akan meningkat 1,5% menjadi 4,82 miliar ton pada 2025 setelah mencetak rekor pada 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperluas kapasitas pertambangan guna menghindari risiko ketersediaan akibat pembatasan emisi karbon dan penutupan tambang karena pelanggaran protokol keselamatan.

Perkembangan ini terjadi ketika utilitas sudah menghadapi persediaan batu bara yang mencapai rekor tertinggi, meningkat 12% dalam dua bulan yang berakhir pada Oktober.

Selain itu, produksi batu bara Indonesia naik ke rekor tertinggi 836 juta ton pada 2024, 18% di atas targetnya, sementara investasi negara dalam sumber energi alternatif semakin membatasi prospek permintaan batu bara.

Faktor-faktor ini cukup untuk mengimbangi peningkatan konsumsi dari China. Konstruksi pembangkit listrik tenaga batu bara mencapai level tertinggi dalam satu dekade tahun lalu, sementara konsumsi diperkirakan meningkat akibat tarif balasan baru terhadap LNG AS.

Mongolia juga berencana meningkatkan produksi dan ekspor batubara ke China hampir 20% pada tahun 2025. Mongolia bertujuan mencapai kapasitas ekspor sebesar 165 juta ton. Sebuah jalur kereta api lintas batas baru antara kedua negara diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ini. CNBC INDONESIA RESEARCH (rev/rev).

Sumber: [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)